



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

Tim Kerja

**PENGUATAN
PENGAWASAN**



2022

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL



**LEMBAR KERJA EVALUASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

**SPI TELAH DIINFORMASIKAN DAN DIKOMUNIKASIKAN
KEPADA SELURUH PIHAK TERKAIT**

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASIBEBAS MELAYANI (WBBM)

DAFTAR ISI

1. Undangan Sosialisasi SPIP 2021
2. Absensi Sosialisasi SPIP
3. Materi Sosialisasi SPIP MK 220621
4. Materi Strategi-SPIP-MK-220621
5. Laporan Sosialisasi SPIP Tahun 2021
6. Foto kegiatan
7. Sosialisasi SPIP
8. Sosialisasi SPIP



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 416/HP.01.02/06/2021
Perihal : Undangan Sosialisasi Sistem Pengawasan Intern
Pemerintah (SPIP)

21 Juni 2021

Area Penguatan Pengawasan

Kepada Yth. **Bapak/Ibu Pegawai di Lingkungan Biro Humas dan Protokol**
Di Tempat

Dalam rangka pembentukan Zona Integritas untuk menuju WBK di lingkungan Biro Humas & Protokol, dengan hormat kami mengundang Bapak, Ibu untuk menghadiri kegiatan sosialisasi Zona Integritas pada:

Hari, tanggal : Selasa, 22 Juni 2021
Waktu : pukul 13.30 WIB
Agenda : Sosialisasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
Narasumber : BPKP

Link Zoom <https://zoom.us/j/92257105770?pwd=ZEdCRjY2SG84Q0pIYVF6ZStTQkdVdz09>

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Ketua,
Sri Handayani

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Jenderal;
2. Yth. Penanggung Jawab WBK Biro Humas Protokol.



Digital Signature
mk-792235920210621103407

No	Timestamp	Nama	Institusi
1	6/22/2021 13:33	Haifa Arief Lubis	Mahkamah Konstitusi
2	6/22/2021 13:33	Lambang ts	Mahkamah Konstitusi
3	6/22/2021 13:34	Fuad Subhan	Mahkamah Konstitusi
4	6/22/2021 13:35	Fitri Yuliana	Mahkamah Konstitusi
5	6/22/2021 13:36	sri handayani	Mahkamah Konstitusi
6	6/22/2021 13:36	Zahra Marida Putri	Mahkamah Konstitusi
7	6/22/2021 13:37	R.A. Indah Apriyati	Mahkamah Konstitusi
8	6/22/2021 13:37	Yuniar Widiastuti	Mahkamah Konstitusi
9	6/22/2021 13:38	hasri puspita ainun	Mahkamah Konstitusi
10	6/22/2021 13:38	mutia	Mahkamah Konstitusi
11	6/22/2021 13:38	Immanuel Hutasoit	Mahkamah Konstitusi
12	6/22/2021 13:40	Angga Putri Gardina	Mahkamah Konstitusi
13	6/22/2021 13:41	Rumaisha	Mahkamah Konstitusi
14	6/22/2021 13:41	Andhini Sayu Fauzia	Mahkamah Konstitusi
15	6/22/2021 13:42	Iman Sudjudi	Mahkamah Konstitusi
16	6/22/2021 13:43	Sri Pujianti	Mahkamah Konstitusi
17	6/22/2021 13:43	HERU SETIAWAN	Mahkamah Konstitusi
18	6/22/2021 13:43	LULU ANJARSARI	Mahkamah Konstitusi
19	6/22/2021 13:43	Iman Sudjudi	Mahkamah Konstitusi
20	6/22/2021 13:44	Nur Budiman	Mahkamah Konstitusi
21	6/22/2021 13:44	Rudi	Mahkamah Konstitusi
22	6/22/2021 13:44	Bangkit	Mahkamah Konstitusi
23	6/22/2021 13:48	Andi siti c b	Mahkamah Konstitusi
24	6/22/2021 13:49	Widi Atmoko	Mahkamah Konstitusi
25	6/22/2021 13:50	Widi Atmoko	Mahkamah Konstitusi
26	6/22/2021 13:51	Hari Kusuma Yuda Tama	Mahkamah Konstitusi
27	6/22/2021 13:53	Nanang Subekti	Mahkamah Konstitusi
28	6/22/2021 13:55	Surya Murni Pangesti	Mahkamah Konstitusi
29	6/22/2021 13:56	Utami Argawati	Mahkamah Konstitusi
30	6/22/2021 13:56	Ifa Dwi Septian	Mahkamah Konstitusi
31	6/22/2021 14:00	Yossy Adriva	Mahkamah Konstitusi
32	6/22/2021 14:03	Gunawan	Mahkamah Konstitusi
33	6/22/2021 14:03	hermanto	Mahkamah Konstitusi
34	6/22/2021 14:04	ilham erwin	Mahkamah Konstitusi
35	6/22/2021 14:11	Dwi Poesvitasari	Mahkamah Konstitusi
36	6/22/2021 14:14	Niniek Widiyanti	Mahkamah Konstitusi
37	6/22/2021 14:19	Wafda Afina	Mahkamah Konstitusi
38	6/22/2021 14:24	Dwi Hardisyah Bramantoro	Mahkamah Konstitusi

Jabatan	Area
Ses. Sekjen	Penguatan Pengawasan
Humas	Penguatan akuntabilitas
Penerjemah Bahasa Rusia	Penguatan dan Pengawasan
Analisis Publikasi	Penataan Sistem Manajemen SDM
Kabag Sektap AACC dan Kerjasama Luar negeri	Ketua Tim Pembangunan ZI Menuju WBK Biro HP
Spesialis Media Sosial	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
Kasubag Sektap,AACC	Penguatan Pengawasan
Penerjemah	Penataan Tata Laksana
kasub TUP	manajemen perubahan
Kasubbag. Humas	VI
Kasubag KSLN	Tata Laksana
Penyusun Kerjasama Pelatihan	
Sekretaris Wakil Ketua MK	Pusat
Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Sekretaris Hakim Konstitusi	Biro Humas dan Protokol
Penyusun Naskah Media MK	Biro HP (Publikasi Media MK)
Karo HP	Pusat
Editor Naskah	Biro HP/Media MK
Sekretaris Hakim	Biro Humas dan Protokol
Media MK	Biro HP
Media MK	Media MK
Staf	
Auditor	
KSDN	Managemen Perubahan
KSDN	Manajemen Perubahan
Sekretaris Hakim Konstitusi	Jakarta
Kabid Program dan Penyelenggaraan	Ketua Tim
Analisis Tata Usaha	
Penyusu Naskah	
Fotografer	
Kasubag KSDN dan HAL	Penguatan Akuntabilitas
Kasubbag Protokol	Manajemen SDM
Design Grafis	Humas
spesialis media sosial	peningkatan pelayanan publik
Auditor	
Sekretaris Hakim Konstitusi	Jakarta Pusat
Analisis Kerjasama Luar Negeri	Penguatan Akuntabilitas
PPNPN Keprotokolan	WBK pengawasan

PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

**Sosialisasi SPIP dalam Rangka Peningkatan Kinerja bagi Unit Kerja
Persiapan WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**

Jakarta, 22 Juni 2021

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN SPIP

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2):

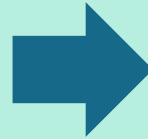
*“Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan **Peraturan Pemerintah.**”*

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

“SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”



SPIP dalam PP 60/2008 bukan hanya terkait pengendalian intern namun mencakup proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GOVERNANCE, RISK, AND CONTROL).



SAIPI Paragraf 3100 :

“Proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern masing-masing tidak didefinisikan secara terpisah dan berdiri sendiri sebagai suatu proses dan struktur, melainkan memiliki hubungan antara proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Oleh karena itu, Auditor harus mengevaluasi proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern auditi secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan”.

Pasal 1

SPI merupakan **proses integral** untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi

Pasal 11

Peran APIP:

- Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan 3E
- **Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas MR**
- Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

Pasal 14

Untuk mencapai tujuan, organisasi perlu menetapkan:

- Strategi operasional
- **Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko**

PP 60/2008 TENTANG SPIP

Pasal 3

Penerapan unsur SPIP dilaksanakan **menyatu dan menjadi bagian integral** dari kegiatan Instansi Pemerintah

Pasal 13

Pimpinan Instansi Pemerintah **wajib melakukan penilaian risiko** terhadap:

- Tujuan Instansi Pemerintah
- Tujuan tingkat kegiatan

Pasal 16

Pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi setiap risiko yang melekat pada sifat, misinya, atau pada kegiatan signifikansi dan kompleksitas dari setiap program spesifik yang dilakukan

DALAM PP 60 TAHUN 2008
PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK:

1
MENYUSUN PERENCANAAN DAN MENETAPKAN TUJUAN ORGANISASI

- SESUAI VISI MISI
- CASCADING SELARAS
- ORIENTASI HASIL/ OUTCOME
- PROGRAM DAN KEGIATAN TEPAT



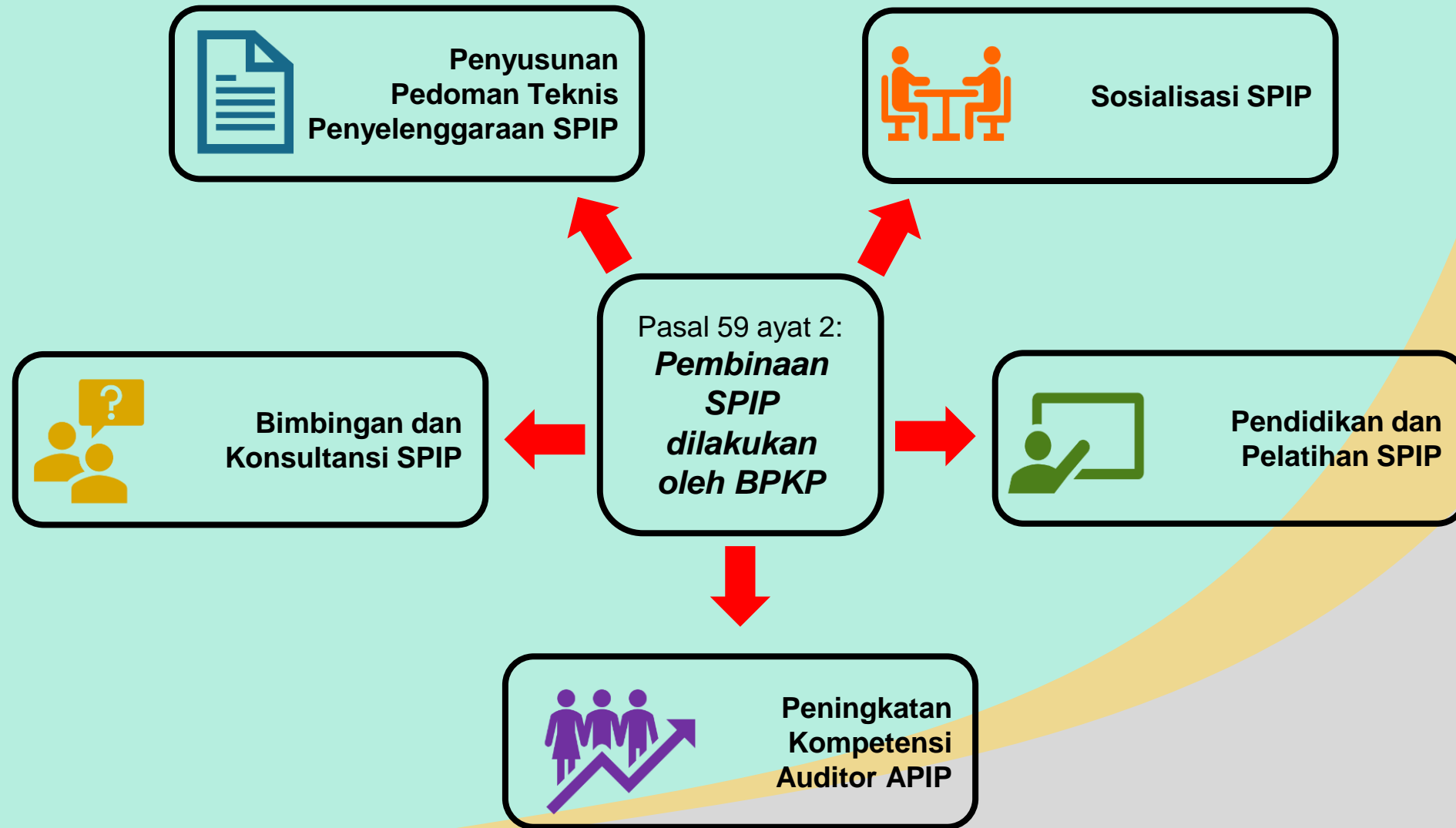
3
MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI MELALUI 4 TUJUAN SPIP

- EFEKTIVITAS & EFISIENSI
- KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN
- PENGAMANAN ASET NEGARA
- KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Sumber: gambar diolah dari PP 60 Tahun 2008

BPKP DIBERIKAN MANDAT PEMBINAAN SPIP DALAM PP 60 TAHUN 2008

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP MELIPUTI:



Sumber: gambar diolah dari PP 60 Tahun 2008

PENGUATAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (BAB III PP 60/2008)

Pasal 47 PP 60/2008:

“Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota **bertanggung jawab** atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.”



Diperlukan *tools* untuk dapat membantu K/L/D dalam menilai kualitas dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern.



BPKP selaku Pembina menerbitkan **pedoman penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP**.



Sumber: gambar diolah dari PP 60 Tahun 2008

PERENCANAAN/PENETAPAN TUJUAN



K/L/D:

TUJUAN:

SASARAN:

INDIKATOR:

STRATEGI PENCAPAIAN

PROGRAM:

KEGIATAN:

INDIKATOR:

KONDISI SISTEM PENGENDALIAN INTERN



APAKAH TERUS DITINGKATKAN KUALITASNYA?

KETERCAPAIAN TUJUAN



CAPAIAN KINERJA (OUTCOME DAN OUTPUT):



PENURUNAN/KENAIKAN JUMLAH TEMUAN DALAM LAPKEU:



KONDISI KEAMANAN ASET (FISIK DAN ADMINISTRASI):



PENURUNAN/KETERJADIAN FRAUD/TIPIKOR:

APAKAH SUDAH TEPAT?

PEMBAHARUAN METODOLOGI PENILAIAN DIPERLUKAN DALAM RANGKA MENGAJUKAN 3 ASPEK TERSEBUT.

GAMBARAN IMPLEMENTASI SPIP, MANAJEMEN RISIKO DAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP PADA K/L/PEMDA

KOTA: XX

VISI: "KOTA XX CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERIMAN".



MISI 3: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN BERBASIS POTENSI JASA KREATIF DAN PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING.



Tujuan	Memperkuat Struktur Perekonomian Kota Dengan Fokus Pengembangan Ekonomi Kreatif
--------	---

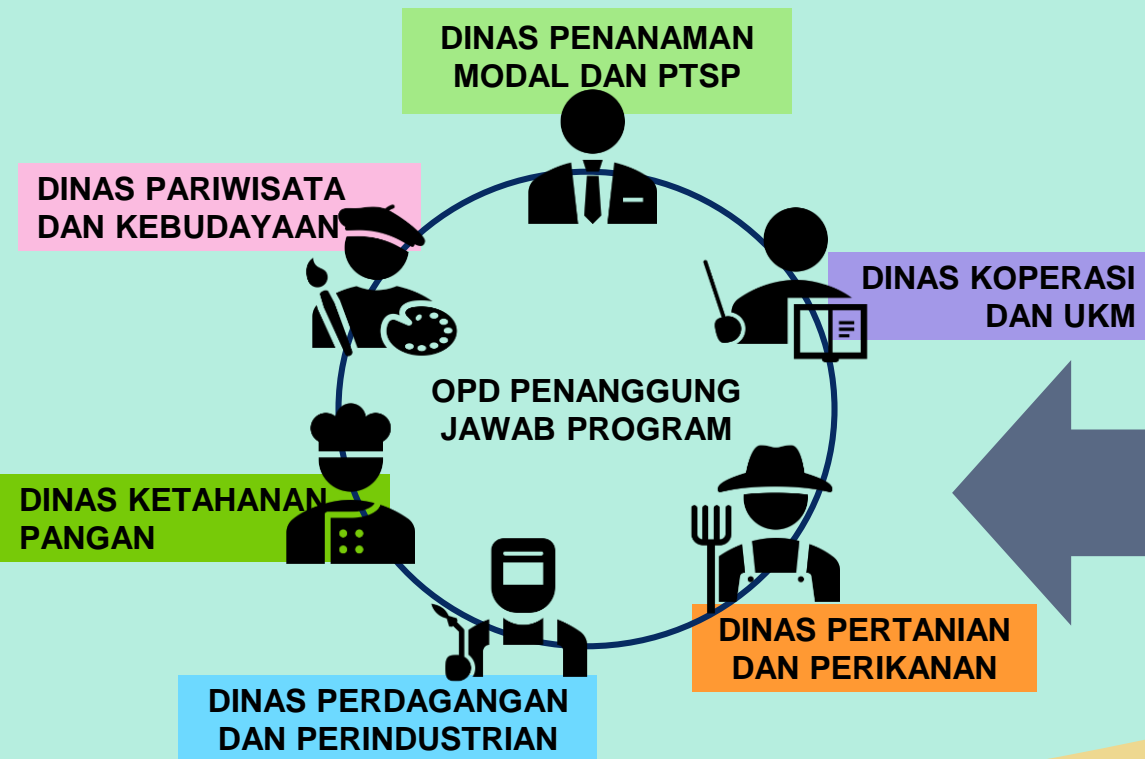
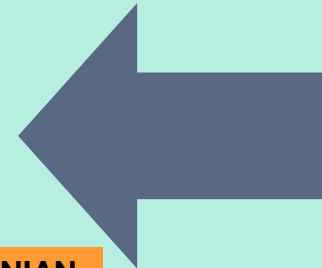
Sasaran: meningkatnya

① Iklim Usaha & Investasi	② PDRB Sektor Eko Kreatif	③ Daya Saing Usaha	④ Daya Beli Masyarakat
------------------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------------



PROGRAM

Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	①	Program Promosi Penanaman Modal
Program Promosi Pariwisata	②	Program Cagar Budaya
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	②	Program Pengembangan UMKM
Program Sarana Distribusi Perdagangan	③	Program Promosi dan Kampanye Pencitraan Produk Ekspor
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	④	Program Target Konsumsi Pangan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	④	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan



PENYELENGGARAAN MR MENGAWAL TUJUAN (DARI TINGKAT OPERASIONAL SAMPAI DENGAN STRATEGIS) AGAR TERCAPAI

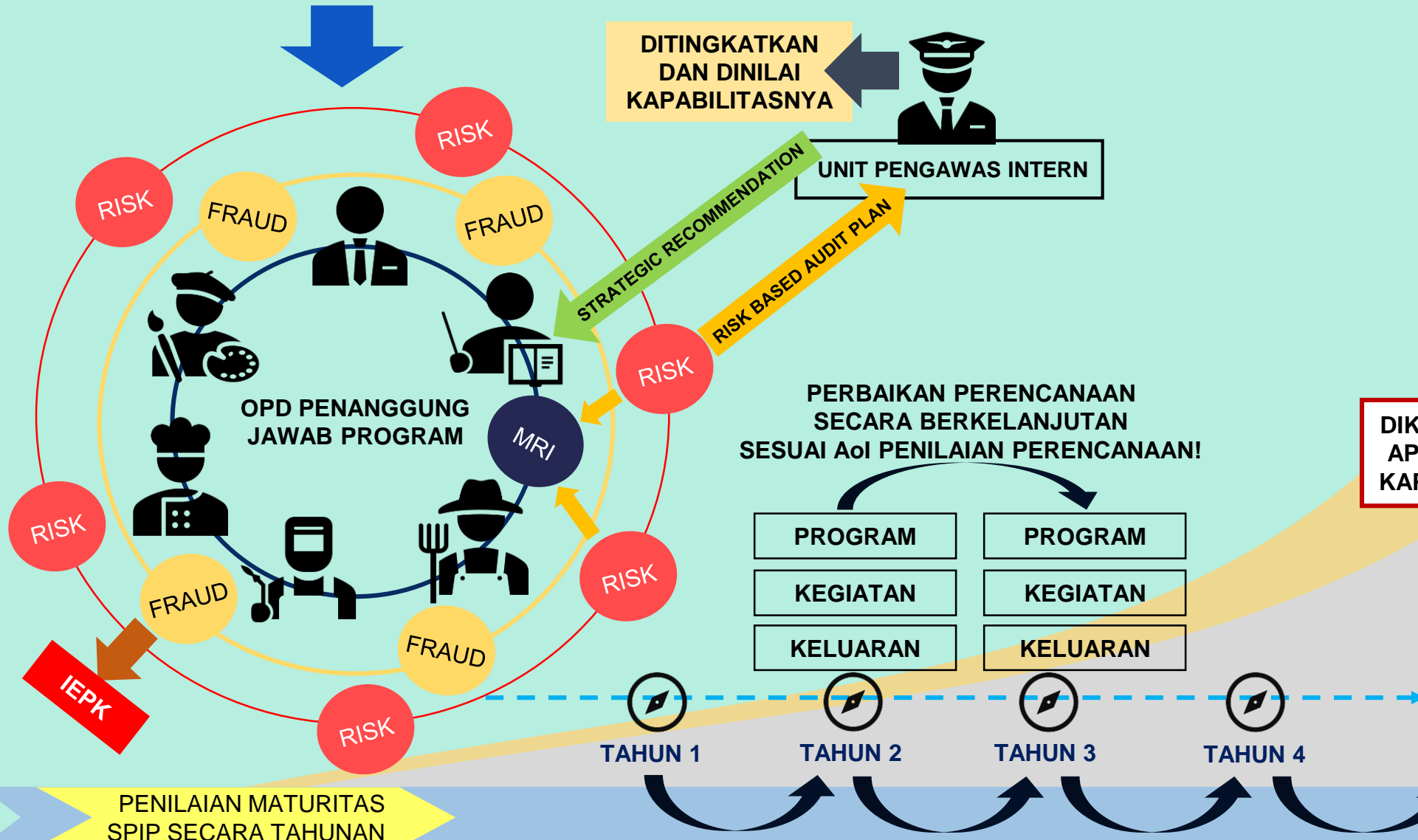
LANJUT SLIDE BERIKUTNYA

NEW SPIP MENCAKUP PENILAIAN KUALITAS PERENCANAAN!

GAMBARAN IMPLEMENTASI SPIP, MANAJEMEN RISIKO DAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP PADA K/L/PEMDA

KOTA: XX VISI: "KOTA XX CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA, DAN BERIMAN".

MISI 3: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN BERBASIS POTENSI JASA KREATIF DAN PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING.



GAMBARAN UMUM SPIP, MRI, IEPK, DAN KAP APIP



DIKAWAL APIP YG KAPABEL

PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD

TAHUN 5

MANFAAT PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP



K/L/D DAPAT MELAKUKAN
PERBAIKAN KUALITAS PERENCANAAN
SECARA BERKELANJUTAN



K/L/D DAPAT MENGENALI DAN MENGATASI
RISIKO-RISIKO ATAS PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN



K/L/D DAPAT MEMINIMALISIR
RISIKO TERJADINYA KORUPSI/FRAUD



K/L/D DAPAT MENGGUNAKAN
SUMBER DAYA SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN



K/L/D DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS
PENGENDALIAN INTERN SECARA BERKELANJUTAN



TERCAPAINYA TUJUAN K/L/D SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN,
LAPKEU YANG HANDAL, ASET YANG AMAN, DAN
TAAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TANTANGAN PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN SPIP, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGAWASAN APIP SAAT INI



FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAN SPIP



FAKTOR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PEDOMAN



Komitmen Manajemen K/LD untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan menerapkan manajemen risiko untuk mendukung pencapaian program yang telah direncanakan.

APIP mendorong penerapan MR termasuk atas risiko-risiko fraud/korupsi, melakukan pengawasan pada area-area yg berisiko tinggi melalui PIBR, dan mendorong perbaikan pengendalian secara berkelanjutan.



Komitmen untuk meningkatkan kompetensi SDM K/LD agar mampu menyelenggarakan pengendalian intern secara memadai dan melakukan penilaian kualitasnya (maturitas SPIP).

PERBANDINGAN PENILAIAN SEBELUM DAN SESUDAH PEMBAHARUAN (NEW SPIP)

SEBELUM

SESUDAH

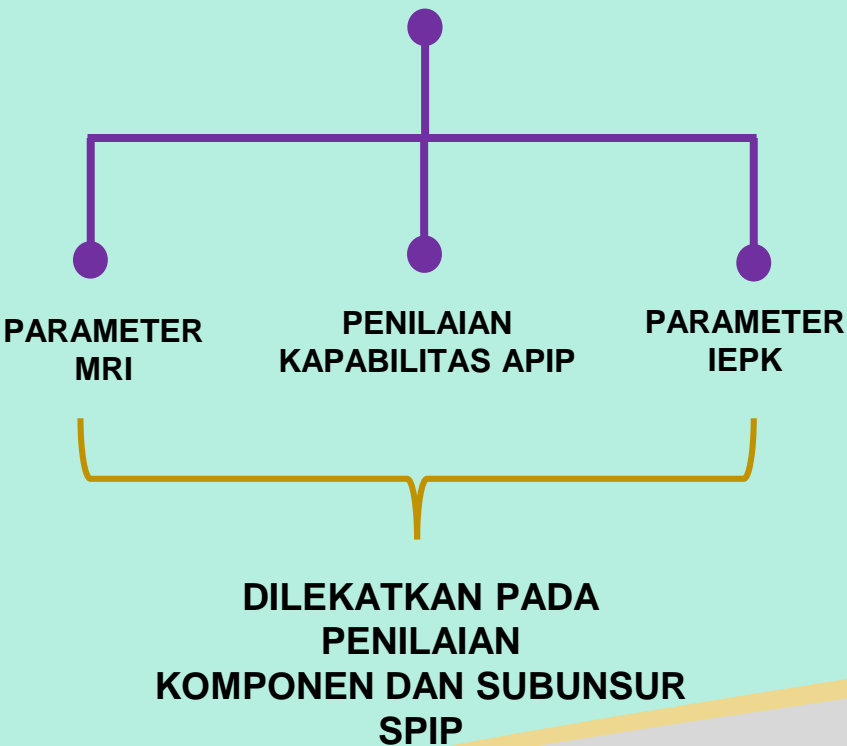
Objek Penilaian	Struktur dan proses	Perencanaan, struktur dan proses, serta pencapaian hasil
Kaitan dengan 4 Tujuan SPIP	Belum dikaitkan	Dikaitkan secara langsung
Penentuan Satker Sampel	Berdasarkan keterwakilan fungsi	Berdasarkan keterwakilan fungsi, sasaran strategis, dan tujuan SPIP
Penilaian Efektivitas Pengendalian	Belum diarahkan	Diarahkan
Metodologi Penilaian	Terkesan <i>document based</i>	Mengedepankan <i>substance over form</i>
Pengintegrasian Penilaian	Hanya menilai unsur-unsur SPIP	Mengintegrasikan penilaian SPIP dengan penilaian MRI, IEPK, dan kapabilitas APIP
Fokus Penilaian	Lebih kepada pemberian skor/level	Penentuan Aol dan pemberian rekomendasi perbaikan proses manajemen untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi
Proses Penilaian	Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas tidak dalam satu proses	Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas menjadi satu proses dan dilakukan oleh K/L/D

POIN PEMBAHARUAN PENILAIAN RESULT BASED SPIP/NEW SPIP

1

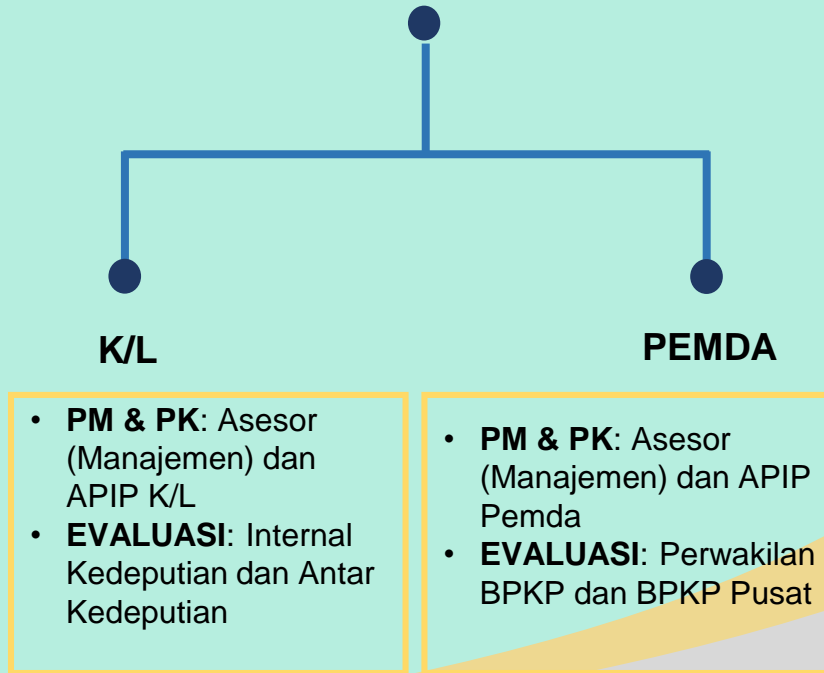
PARAMETER PENILAIAN TERINTEGRASI

INTEGRASI PARAMETER PENILAIAN



2

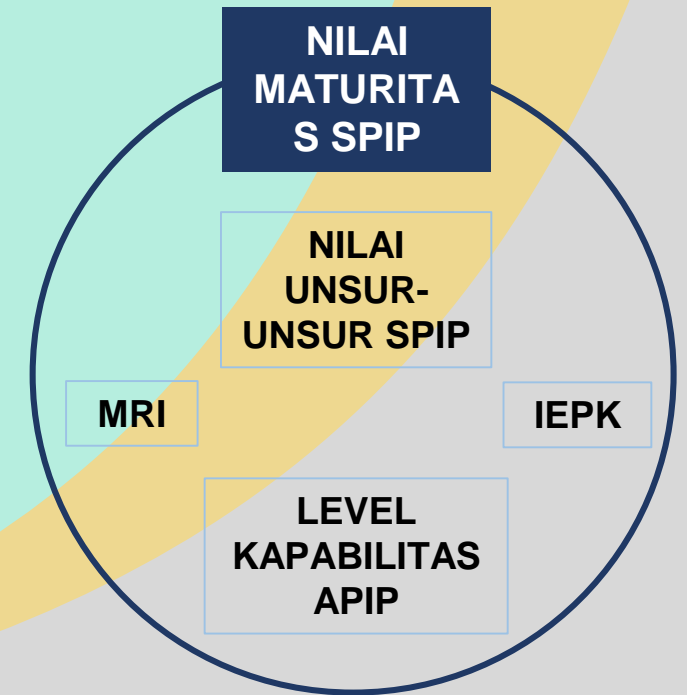
KOLABORASI K/L/D DAN BPKP DALAM PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP



***PM:** Penilaian Mandiri **PK:** Penjaminan Kualitas

3

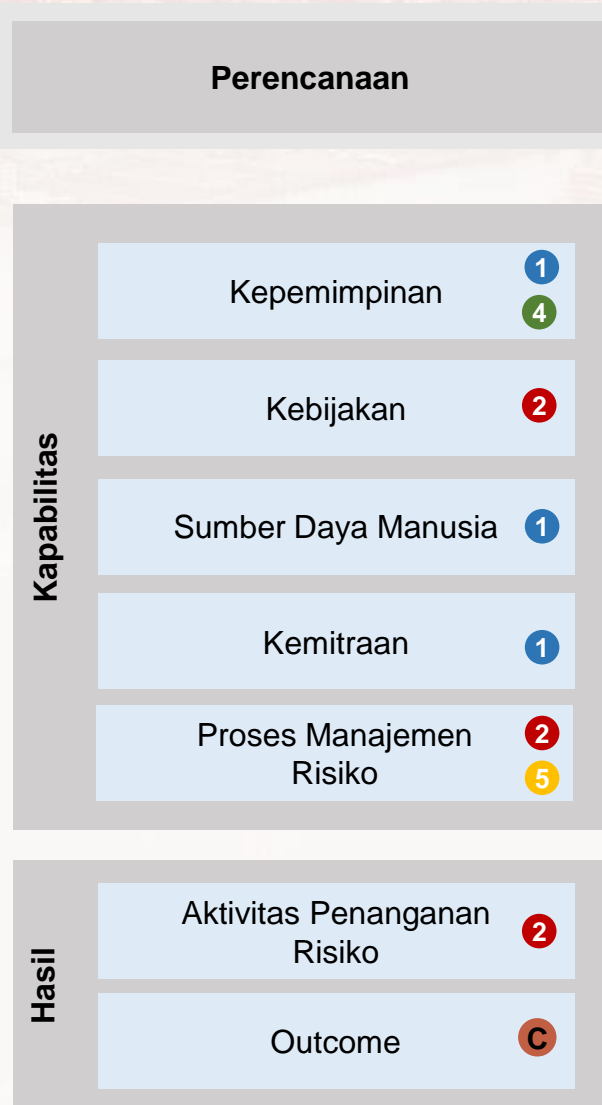
4 NILAI DALAM MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP



***MRI:** Manajemen Risiko Indeks
IEPK: Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

INTEGRASI PARAMETER PENILAIAN

MANAJEMEN RISIKO INDEKS



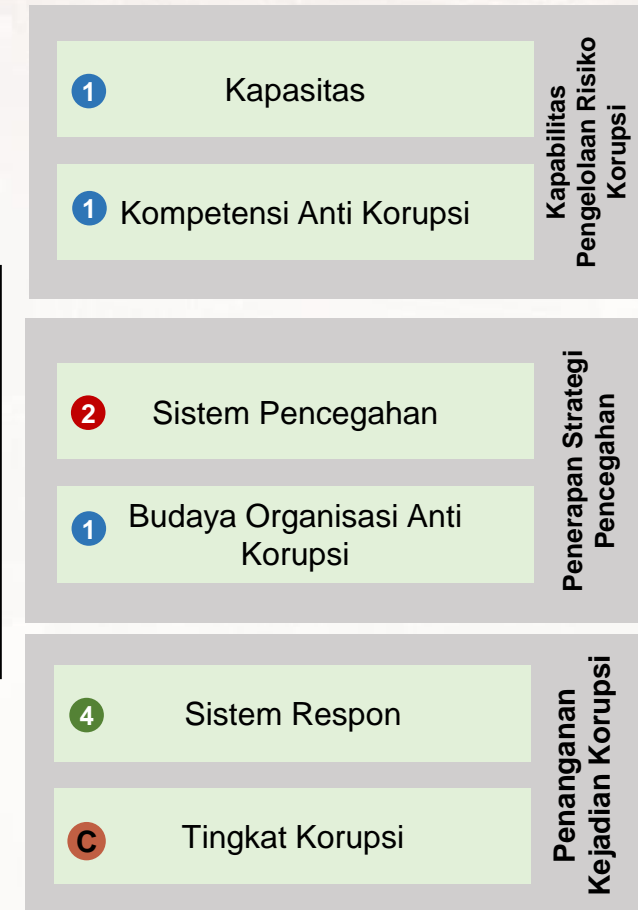
Adaptasi: HM Treasury

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH



Sumber: PP No. 60 Tahun 2000 tentang SPIP

INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI



Sumber: FRM



KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS SPIP



OPTIMUM (Level 5)

Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik** dan **strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi**, dengan struktur dan proses **pengendalian telah efektif** untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta **adaptif terhadap perubahan** lingkungan organisasi.

TERKELOLA DAN TERUKUR (Level 4)

Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik** dan **strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi**, struktur dan proses **pengendalian telah efektif** namun **belum adaptif** terhadap perubahan lingkungan organisasi.

TERDEFINISI (Level 3)

Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik** dan **strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi**, serta **pengendalian telah dilaksanakan** namun **belum efektif**.

BERKEMBANG (Level 2)

Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik**, namun **strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan** serta pelaksanaan **pengendalian masih sebatas pemenuhan**.

RINTISAN (Level 1)

Organisasi **belum mampu mendefinisikan kinerjanya**, termasuk **strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya**.

KARAKTERISTIK LEVEL MATURITAS

KARAKTERISTIK LEVEL

Menyusun
Perencanaan
Kinerja

Mampu
Mendefinisikan
Kinerja

Strategi
Pencapaian
Relevan
dan Terintegrasi

Desain dan
Kebijakan
Pengendalian

Struktur dan
Proses
Pengendalian
Telah
Dilaksanakan

Struktur dan
Proses
Pengendalian
Efektif

Adaptif
Terhadap
Perubahan

5



4



3



2



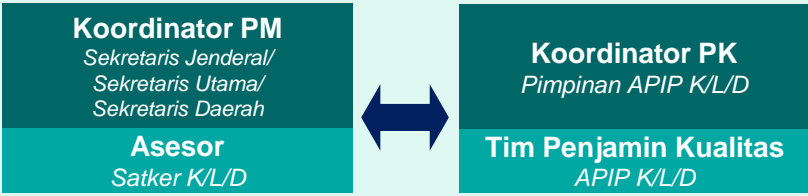
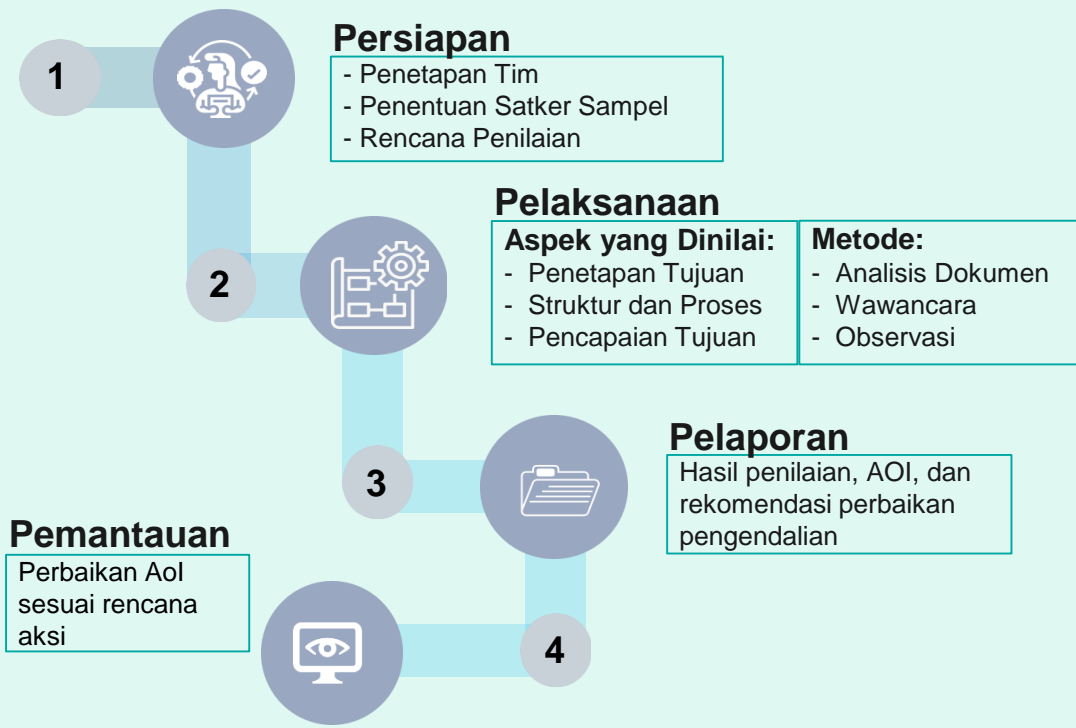
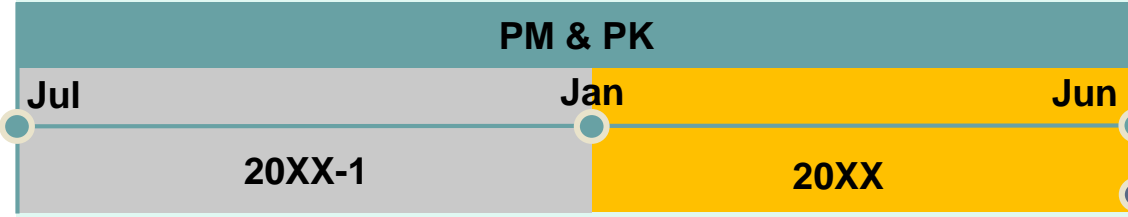
1



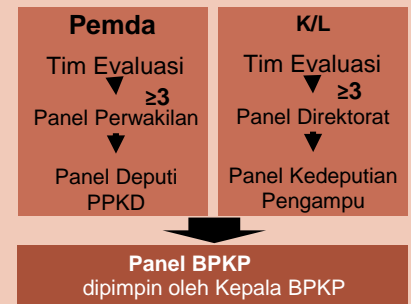
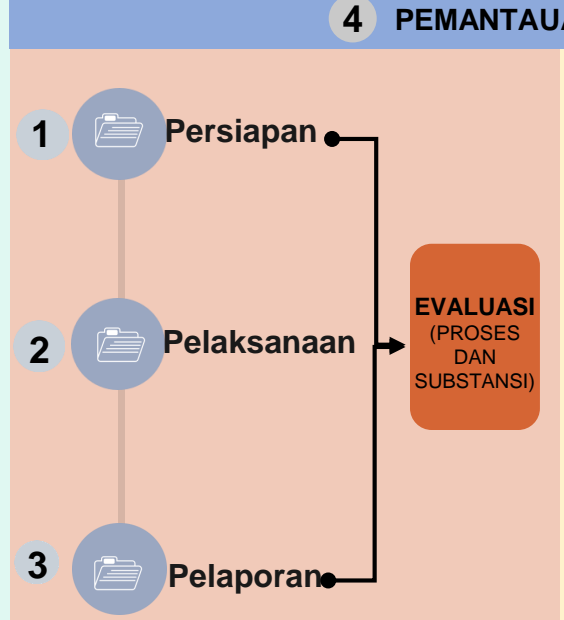
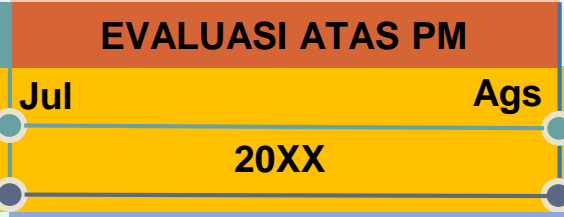
P R O S E S B I S I S



PENILAIAN MANDIRI/ PENJAMINAN KUALITAS

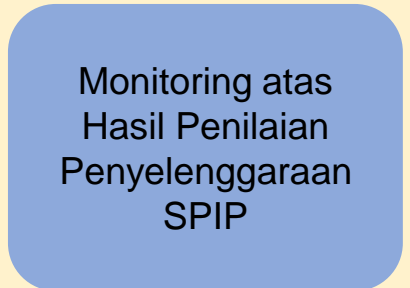


PENETAPAN LEVEL SPIP



PERBAIKAN BERKELANJUTAN

4 PEMANTAUAN



K/L/D

BPKP

K/L/D dan BPKP

TERIMA KASIH



SAHABAT PENGENDALIAN



STRATEGI MANAJEMEN

Dalam Rangka Penguatan SPIP

Oleh:

Dr. Didi Wahyudi, Ak., M.Ec.Dev., CA, CCSA, CRMP, CGCAE
Koordinator Pengawasan Bidang Penegakan Hukum

**Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
pada Unit Kerja Persiapan WBK/WBBM di Lingkungan Mahkamah Konstitusi
Jakarta, 22 Juni 2021**

- Lingkungan pengendalian
- Penilaian risiko
- Kegiatan pengendalian
- Informasi & komunikasi
- Pemantauan pengendalian intern

- Efektivitas dan efisiensi operasi
- Keandalan pelaporan keuangan
- Ketaatan terhadap peraturan
- Pengamanan aset

UNSUR

TUJUAN



- Tingkat entitas
- Tingkat transaksi/kegiatan

LINGKUP IMPLEMENTASI

SPIP



5 PRIORITAS KERJA JOKOWI & MA'RUF



- Pembangunan sumber daya manusia
- Pembangunan infrastruktur
- Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi
- Penyederhanaan birokrasi
- Transformasi ekonomi

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 adalah
"Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas"

Tema pembangunan ini dijabarkan dalam 5 Prioritas Nasional

yaitu :



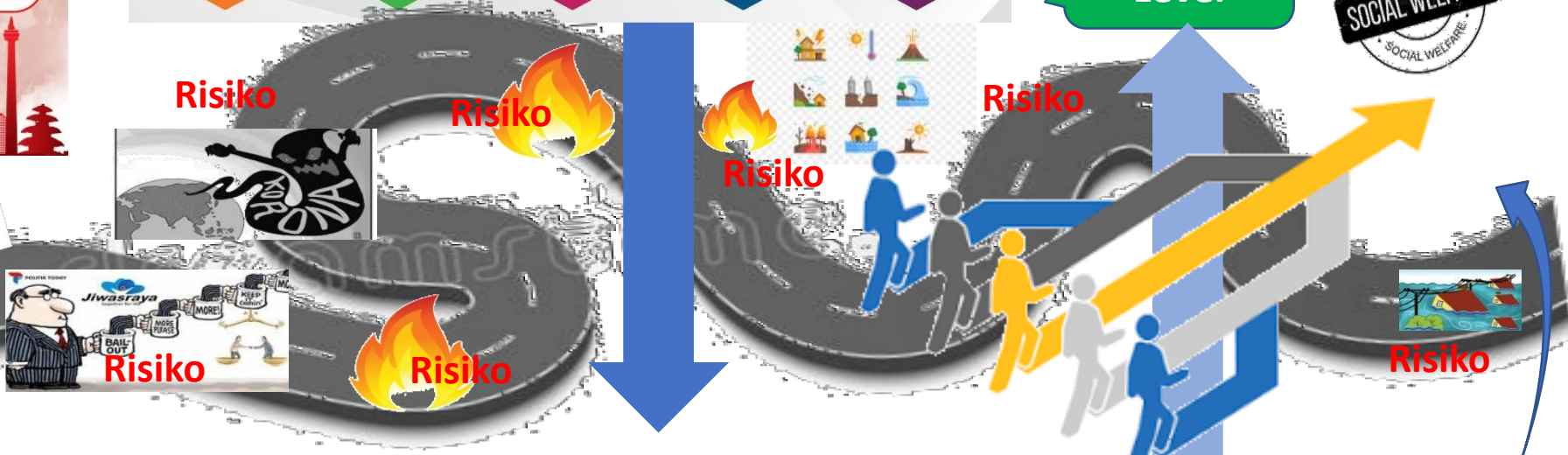
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020 - 2024

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia	Memajukan kesejahteraan umum
Tujuan Negara Indonesia	
Mencerhdaskan kehidupan bangsa	Ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

National Level



Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi BUMN



Entity Level

Aktor-aktor Pembangunan

Sekjen/Dirjen Sekda/Kepala Dinas

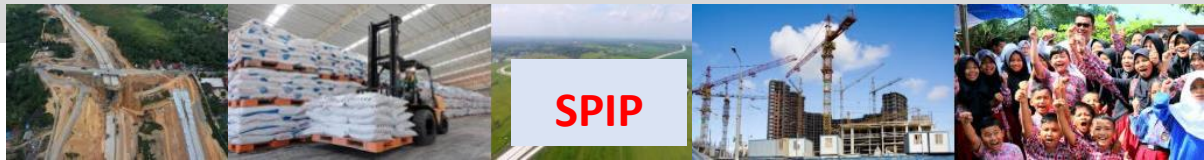
Manajemen dan Staf



Program K/L/P

Activity Level

APIP



SPIP

7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 - 2024



Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas



Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan



Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing



Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa



Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim



Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan

Indikator, antara lain:

- 1) Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN jangka menengah, pengembangan kompetensi, dan pola karir
- 2) Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun proses bisnis instansional
- 3) Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun arsitektur SPBE instansional
- 4) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan manajemen strategis
- 5) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi
- 6) Penerapan manajemen tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
- 7) Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional dengan mutasi level III
- 8) Jumlah unit pelayanan publik yang telah menerapkan standar pelayanan publik
- 9) Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui LAPOR! SP4N

PENTINGNYA SPIP DAN KUNCI KEBERHASILAN SPIP

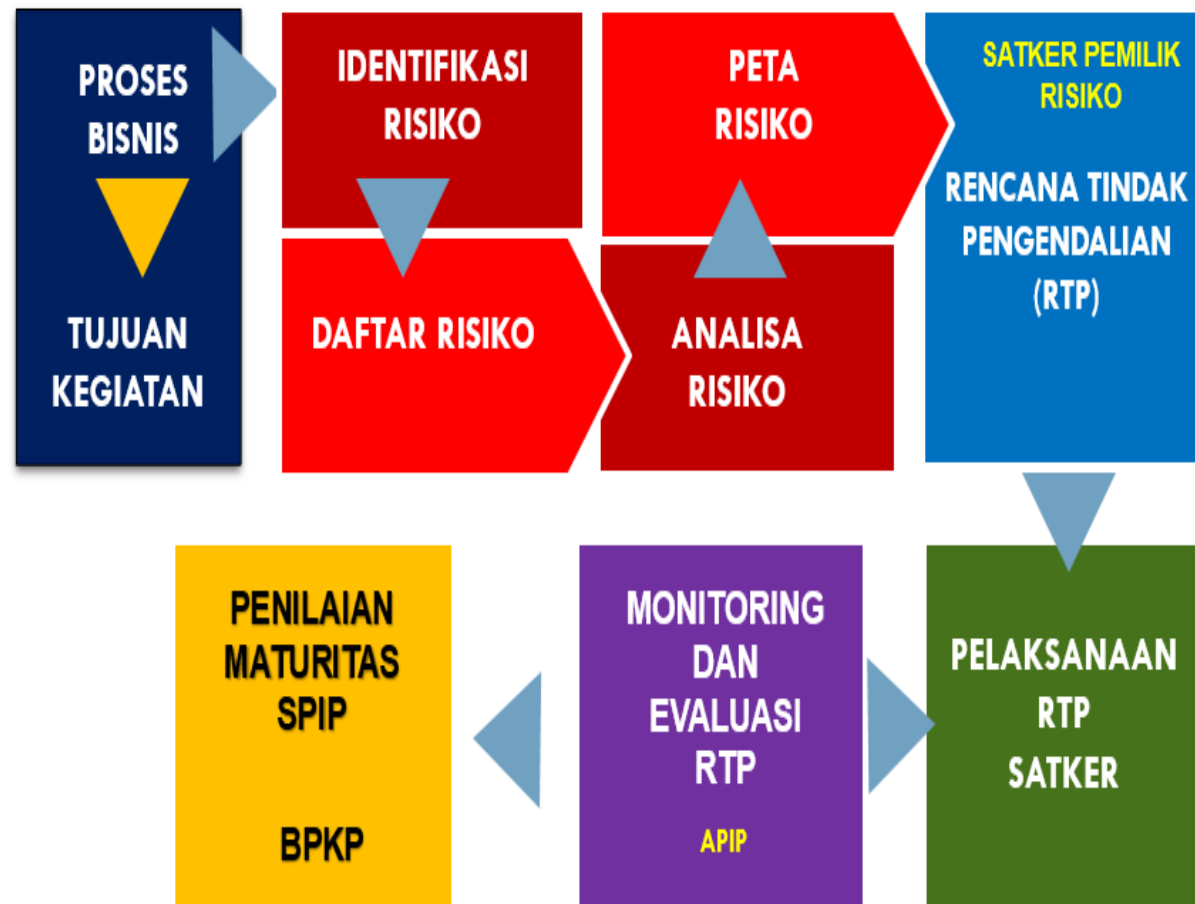
PENTINGNYA SPIP

- 1 Memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
- 2 Meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
- 3 SPIP bukan tugas tambahan, tetapi terintegrasi dengan tanggungjawab manajemen & melibatkan semua pegawai

KEBERHASILAN SPIP

- 1 • Dukungan dari Jajaran Pimpinan
- 2 • Membangun Kebijakan Institucional
- 3 • Mengkomunikasikan Kebijakan
- 4 • Mengelola Risiko pada Tingkat Instansi
- 5 • Mengelola Risiko pada Tingkat Kegiatan
- 6 • Monitor dan Reviu Risiko

Tahapan Penyelenggaraan SPIP



1. Tahap Persiapan

- Peraturan ttg Penyelenggaraan SPIP
- Pembentukan Satgas SPIP
- Sosialisasi

2. Tahap Pelaksanaan

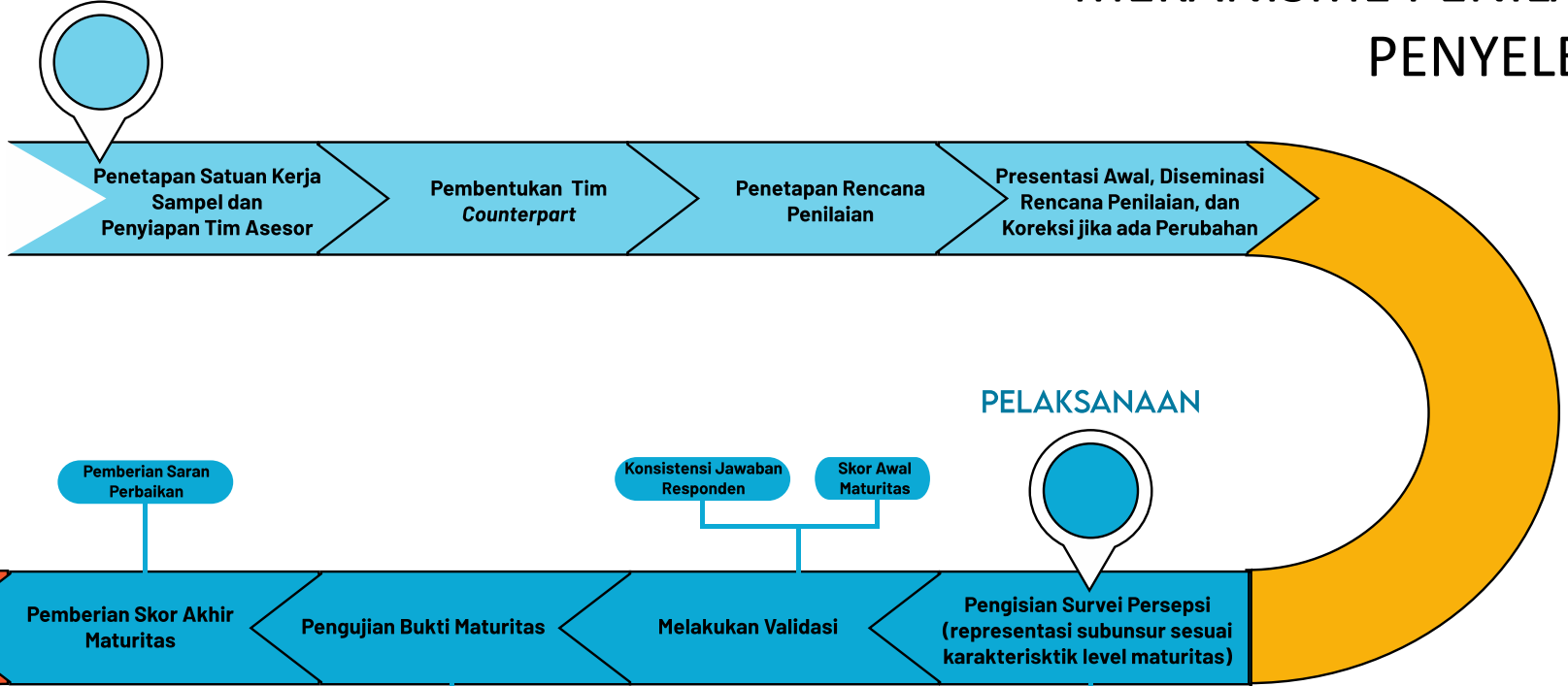
- Analisis Tujuan
- Penilaian Lingkungan Pengendalian
- Penilaian Risiko
- Penilaian atas pengendalian terpasang
- Penyusunan RTP

3. Implementasi RTP

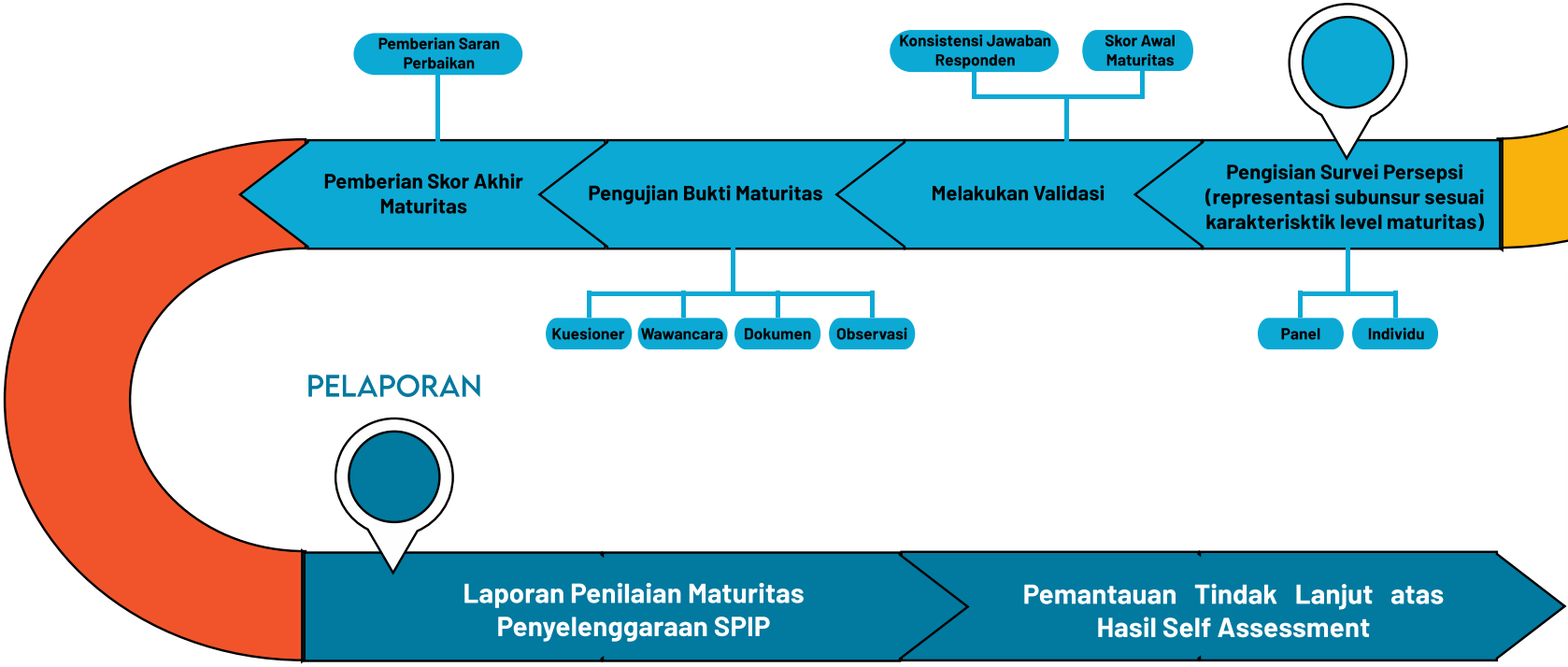
- Membangun infrastruktur
- Mengkomunikasikan pengendalian
- Pelaksanaan kebijakan dan prosedur
- Pemantauan atas pelaksanaan pengendalian

MEKANISME PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

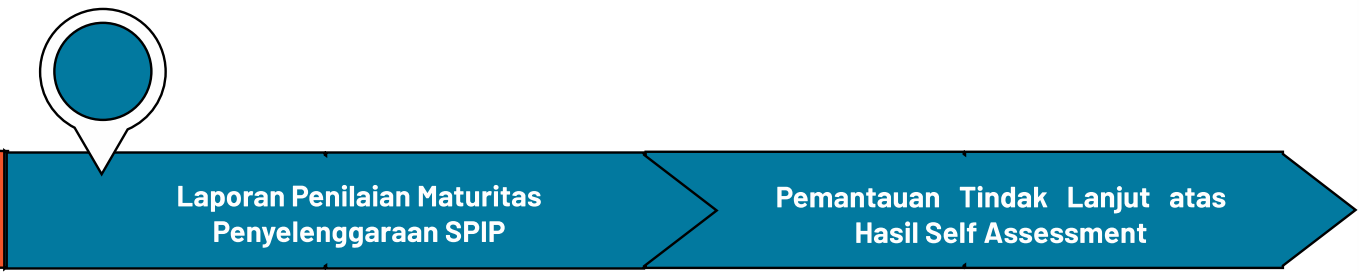
PERSIAPAN



PELAKSANAAN



PELAPORAN



LEVEL 5	OPTIMUM	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian Intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer 	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Pemantauan/Pengembangan Berkelanjutan
LEVEL 4	TERKELOLA DAN TERUKUR	<ul style="list-style-type: none"> Ada praktik pengendalian intern yang efektif Evaluasi formal, berkala, dan terdokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Evaluasi formal, berkala, dan terdokumentasi
LEVEL 3	TERDEFINISI	<ul style="list-style-type: none"> Ada praktik pengendalian intern Terdokumentasi dengan baik Evaluasi dilakukan terdokumentasi Ada praktik pengendalian intern namun dokumentasi belum baik Polikuanan bergantung pada individu Efektifitas pengendalian belum dievaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Implementasi Kebijakan dan Prosedur yang Terdokumentasi ⊕ Pengkomunikasian Kebijakan dan Prosedur
LEVEL 2	BERKEMBANG	<ul style="list-style-type: none"> Ada praktik pengendalian intern Kebijakan dan prosedur tertulis Hasil bersifat adhoc Tanpa komunikasi dan pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Kebijakan dan Prosedur Tertulis
LEVEL 1	RINTISAN	Belum memiliki kebijakan dan prosedur	
LEVEL 0	BELUM ADA		

PENGERTIAN RISIKO

“**EFEK** dari **KETIDAKPASTIAN** terhadap Pencapaian **SASARAN ORGANISASI**” (ISO 31000)

EFEK

Penyimpangan
dari yang diharapkan -
Positif dan/atau Negatif

Apa yang Berjalan Dapat Salah?

KETIDAKPASTIAN

Perbedaan yang dikaitkan
dengan suatu Peristiwa,
Dampak atau mungkin
terjadinya

Berapa Besar
Kemungkinan
itu?

Apa Dampak
yang terjadi?

SASARAN ORGANISASI

- Dpt Memiliki Aspek yg Berbeda,, Ex: keuangan, Keamanan, Lingkungan
- Dapat menerapkan tingkat yang berbeda, misalnya strategis, operasional atau proyek,

Suatu Kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan internal Pemerintah (PP Nomor 60 Tahun 2008)

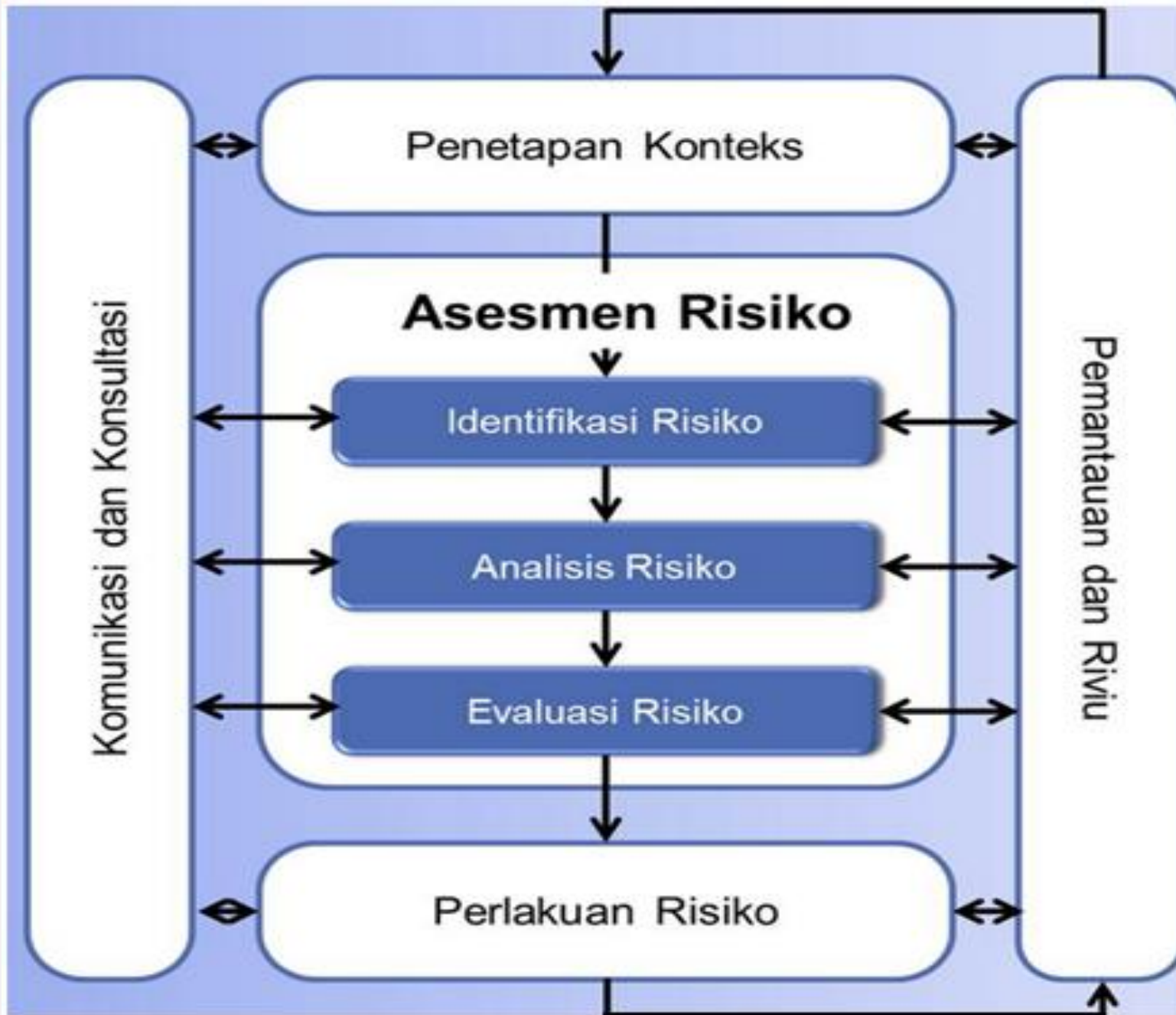


PENGELOLAAN RISIKO

(ISO 31000)

“Aktivitas-Aktivitas Terkoordinasi, yang dilakukan dalam rangka mengelola dan Mengontrol sebuah Organisasi terkait dengan Risiko yang dihadapinya”





PROSES PENGELOLAAN RISIKO

11 Prinsip Pengelolaan Risiko

01

Menciptakan nilai tambah

02

Bagian Integral Proses Organisasi

03

Bagian Pengambilan Keputusan

04

Menangani Ketidakpastian

05

Sistematis, Terstruktur & Tepat Waktu

06

Berdasarkan Informasi Terbaik

07

Dibuat Sesuai Kebutuhan

08

M'pertimbangkan Faktor Manusia & Budaya

09

Transparan dan Inklusif

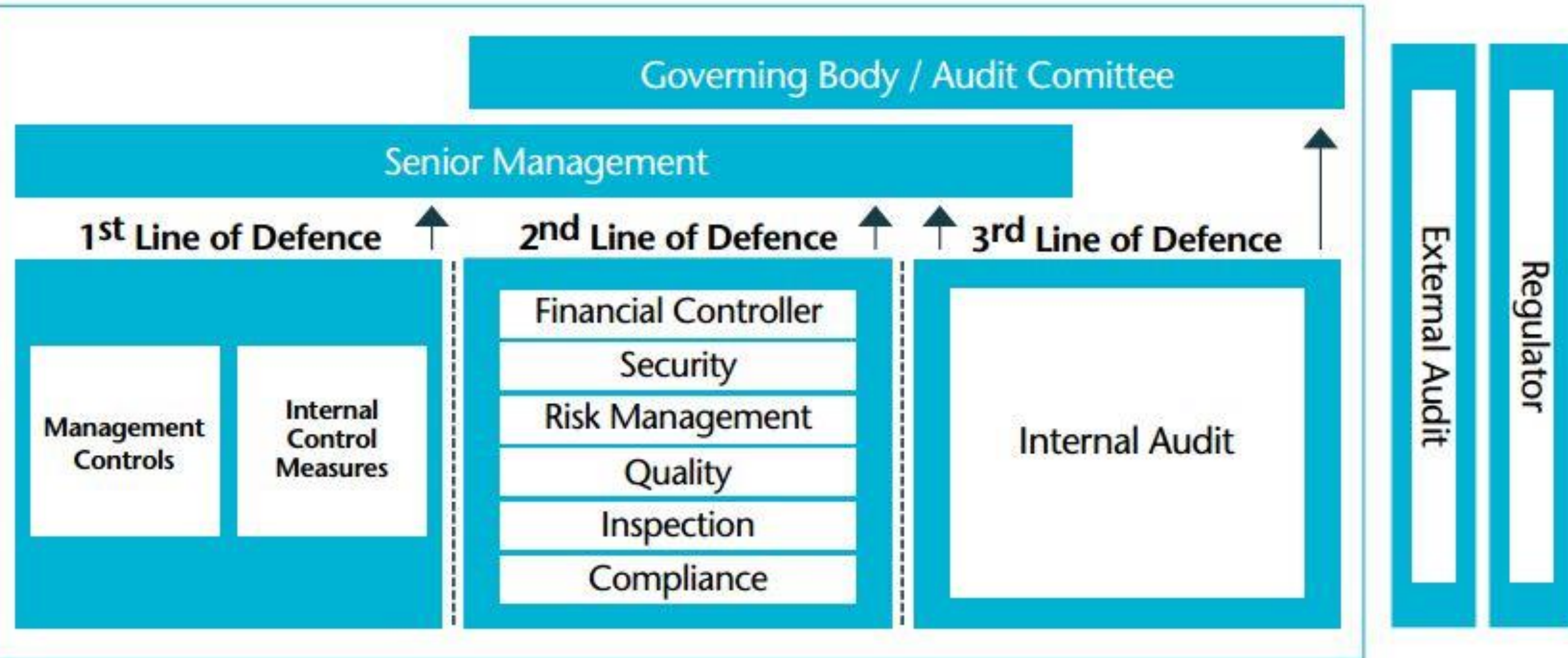
10

Dinamis, Interaktif dan Responsif

11

Perbaiki Organisasi Berkelanjutan

THREE LINES OF DEFENSE FRAMEWORK



Sumber: The IIA Preposition Paper

PENERAPAN MR DENGAN *Control Self Assessment (CSA)*

Unit Kerja

Risk
Register

Penilaian
Risiko

Maturity
Level

- Unit Kerja Melakukan Penilaian Risiko secara Mandiri
- Unit Kerja Memiliki *Risk Register*
- Tersusun Berdasarkan urutan/Skala Risiko dan Peta Risiko (*Risks Map*)
- Tingkat Penerapan MR berbeda/Tidak Sama => Maturity Level MR
- Metodologi CSA: Workshop/Forum Diskusi yang difasilitasi
- Menilai Kecukupan proses pengelolaan dan Pengendalian Risiko

TUJUAN ANALISIS RISIKO



DAFTAR RISIKO

STATUS RISIKO Departemen/Direktorat

Visi :
Misi :
Tujuan :

No.	Risiko	Kemungkinan		Dampak		Status
		%	Kategori	%	Kategori	

Disusun oleh :

Direviu oleh :

PETA/PROFIL RISIKO

D A M P A K

K E M U N G K I N A N		1 – Tidak berarti	2 – Kecil	3 – Sedang	4 – Besar	5 – Luar Biasa
	5 – Hampir pasti terjadi	5	10	15	20	25
	4 – Sering terjadi	4	8	12	16	20
	3 – Mungkin terjadi	3	6	9	12	15
	2 – Jarang terjadi	2	4	6	8	10
	1 – Hampir tidak terjadi	1	2	3	4	5

RESPON TERHADAP RISIKO



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

MEKANISME PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

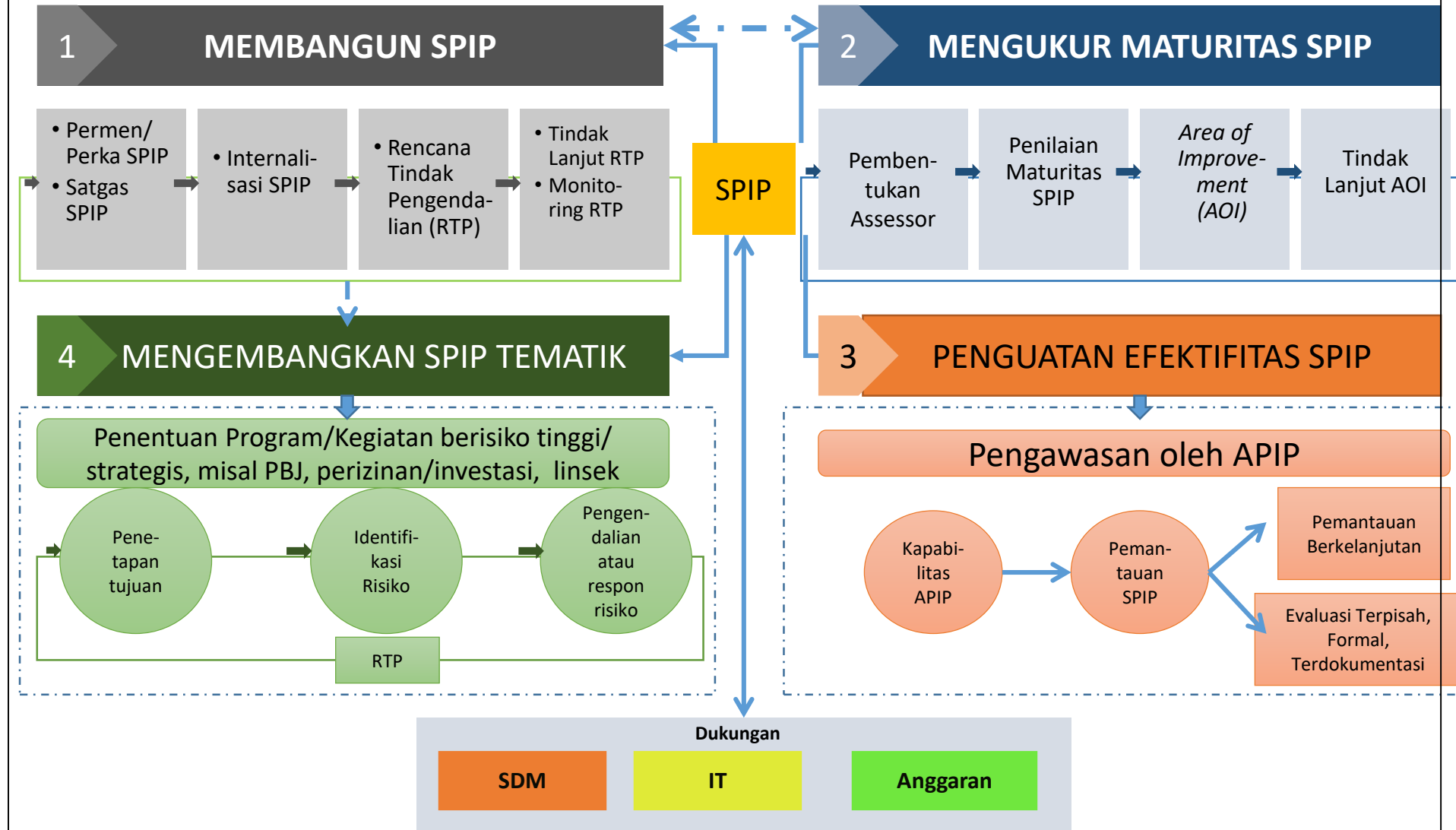
Secara umum, RTP meliputi:

- pernyataan tujuan dan sasaran unit kerja dan tingkatan kegiatan yang terkonfirmasi,
- rencana penguatan lingkungan pengendalian,
- peta risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran,
- rencana penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko,
- rencana pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya, dan
- rencana pemantauan keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya.

RTP antara lain memuat jadwal pelaksanaan kegiatan, waktu yang dibutuhkan, penyediaan dana/anggaran, SDM, metode yang akan digunakan, sarana dan prasarana, serta peralatan yang diperlukan guna penerapan SPIP yang direncanakan, dan pihak-pihak terkait

**SPIP harus bisa menjadi culture
=> Budaya pengendalian intern
melalui awareness terhadap risiko**

STRATEGI PENINGKATAN MATURITAS SPIP



SIMPULAN

Harus ada *conformity* dengan hasil penilaian lainnya – cek kembali bukti dan identifikasi *area of improvement* .

Perbaiki proses penilaian risiko agar dapat mencakup risiko-risiko strategis atas pencapaian tujuan utama Mahkamah Konstitusi.

Explore lebih lanjut terkait inovasi, perbaikan pengendalian intern, dan tindak lanjut evaluasi SPI/pemeriksa dan tingkatkan kualitasnya.

Perlu disusun strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP dan penerapan manajemen risiko untuk mencapai sasaran strategis Mahkamah Konstitusi.



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2021 Melalui Aplikasi Zoom, 22 Juni 2021

I. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP yang dilakukan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban. Penyelenggaraan SPIP harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kegiatan operasional Mahkamah Konstitusi. Sosialisasi SPIP secara berkala adalah salah satu upaya untuk mendorong unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk dapat terus meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP secara berkelanjutan.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Sosialisasi SPIP Tahun 2021 dilaksanakan pada Selasa, 22 Juni 2021, Pukul 13.30 sampai dengan selesai, melalui aplikasi zoom.

B. Peserta

Peserta kegiatan Sosialisasi SPIP Tahun 2021 adalah pegawai dari unit kerja yang tengah diusulkan menjadi unit kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu Biro

Humas dan Protokol, Pusat TIK, dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

C. Narasumber

Narasumber kegiatan Sosialisasi SPIP Tahun 2021 adalah Koordinator Pengawasan Bidang Penegakan Hukum BPKP, Bapak Dr. Didi Wahyudi, Ak., M.Ec.Dev., CA, CCSA, CRMP, CGCAEK.

D. Penyampaian Materi

Hal-hal pokok yang dijelaskan oleh narasumber adalah sebagai berikut:

- Sistem Pengawasan Intern (SPI) ditetapkan dengan peraturan pemerintah. SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalannya pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Tujuan dilakukannya SPIP, yakni efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan dan pengamanan aset.
- BPKP bertanggung jawab dalam hal penerbitan pedoman, pembinaan dan pelatihan APIP dan manajemen K/L/D. Penjelasan SPIP dalam PP 60/2008 ini bukan hanya terkait pengendalian intern, namun mencakup proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian (Governance, Risk and Control).
- Pada PP 60 Tahun 2008 Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun perencanaan dan menetapkan tujuan organisasi, membangun sistem pengendalian intern yang memadai dan mencapai tujuan organisasi melalui 4 tujuan SPIP. SPIP berperan penting untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Selain itu untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. SPIP bukan tugas

tambahan tetapi terintegrasi dengan tanggung jawab manajemen dan melibatkan semua pegawai.

- Untuk keberhasilan SPIP diperlukan dukungan dari jajaran pimpinan baik membangun kebijakan institusional, mengkomunikasikan kebijakan, mengelola resiko pada tingkat instansi, mengelola resiko pada tingkat kegiatan dan monitor dan review resiko itu sendiri. Tahapan penyelenggaraan SPIP dibagi menjadi 3 (tiga) tahap. Adapun tahap yang dimaksud yakni tahap persiapan, tahap pelaksana dan implementasi.

III. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Sosialisasi SPIP Tahun 2021.

Jakarta, 23 Juni 2021

Kepala Biro Humas dan Protokol

Heru Setiawan

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

MEKANISME PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN



RTP KEBIJAKAN DAN PROSEDUR YANG AKAN DIPERBAIKI ATAU DISUSUN

PROSES PERBAIKAN ATAU PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

 <p>Didi Wahyudi</p>	 <p>Dwi H Bramantoro</p>	 <p>Budi Djohari-Inspektorat ...</p>	 <p>wijang ardi rahmadi</p>
 <p>Bambang Sukmadi</p>	 <p>Amelia Desy_Inspekto...</p>	 <p>Inspektorat Mahkama...</p>	 <p>Dir-Polgakum BPKP/T...</p>
 <p>Nanang Subekti</p>	 <p>Pangesti Perdana</p>	 <p>Heru Setiawan</p>	 <p>muti</p>
 <p>Nur Rakhman</p>	 <p>Rahman_Pusdik</p>	 <p>Andhini Sayu Fauzia</p>	 <p>Iman Sudjudi MK</p>
 <p>MKRI_Yossy Adriva</p>	 <p>Yahya Amarullah Taufi...</p>	 <p>Rizki, Inspektorat MK</p>	<p>Andi siti</p>













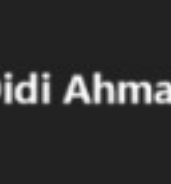

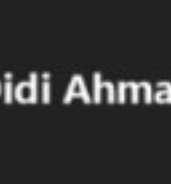
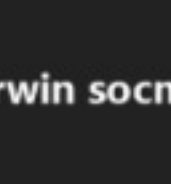




**SPIP harus bisa menjadi culture
=> Budaya pengendalian intern
melalui awareness terhadap risiko**



Andi siti 	Dian Dwi Hapso... 	Dhita Mahkamah Kon... 	Ardiansyah Salim
Muhammad Rizki Ins... 	Hadian Taofik 	arshinta 	Melati Kusuma...
Haifa Arief, MK 	Hasri Puspita Ai... 	Afina_MK 	sri handayani
Gardina 	Indah tomas 	Fuad Subhan 	Taufik Gunanda
Bangkit Panji Anarogo 	Fajar Laksono S... 	Immanuel Huta... 	Gunawan_MK

- Dukungan
- SDM
 - IT
 - Anggaran



 Haifa Arief, MK	 Hasri Puspita Ai...	 Afina_MK	 sri handayani
 Gardina	 Indah tomas	 Fuad Subhan	 Taufik Gunanda
 Bangkit Panji Anarogo	 Fajar Laksono S...	 Immanuel Huta...	 Gunawan_MK
 Didi Ahmadi	 Dillon D. Zebadiah	 Lesmana Ramad...	 erwin socmed
 Zahra MR	 Rumaisha	 Nanda Adytians...	 Yuda_Biro HP

- SDM
- IT
- Anggaran

Participant thumbnails and names:

- Fuad Subhan
- Budi Djohari-Ins...
- Didi Wahyudi
- Nanang Sub...
- Heru Setiawan
- wijang ardi r...



Participants (48)

Find a participant

- FS Fuad Subhan (Me)
- Rizki, Inspektorat MK (Host)
- DB Dir-Polgakum BPKP/Tri Handoyo
- AS Andhini Sayu Fauzia
- B_MK_Vita
- Bangkit Panji Anarogo
- DA Didi Ahmadi
- Dillon D. Zebadiah
- DH Dwi H Bramantoro
- FL Fajar Laksono Suroso_MK
- Gunawan_MK
- H Heru Setiawan
- IS Iman Sudjudi MK
- IH Immanuel Hutasoit
- LR Lesmana Ramadon
- MF M. Fadhel
- MA MKRI_Yosy Andri...

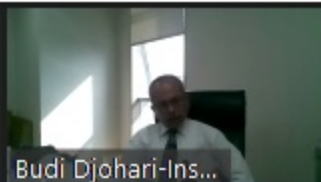
Go to Settings to activate Windows.

Buttons: Invite, Unmute Me, Leave

Zoom Meeting Control Bar:

- Audio (muted)
- Start Video (muted)
- Participants: 48
- Chat
- Share Screen
- Raise Hand
- Record
- Leave

Fuad Subhan



Budi Djohari-Ins...



Dir-Polgaku...



Nanang Sub...



Heru Setiawan



wijang ardi r...



Recording



Didi Wahyudi

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Leave

Audio Start Video Participants 48 Chat Share Screen Raise Hand Record